

PEMBERDAYAAN MADRASAH DAN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT**Moh. Miftachul choiri**

Dosen Tetap pada Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo
Jl. Pramuka 156 PO BOX 116 Ponorogo - Jawa Timur, 63471
Email: miftahch@yahoo.com

Abstrak: Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas agama Islam mempunyai karakteristik yang unik. Mayoritas madrasah lahir dari prakarsa masyarakat di mana madrasah tersebut lahir. Karena dilahirkan dari masyarakat maka kualitas madrasah menjadi beragam. Madrasah yang didukung oleh masyarakat yang secara sosio-ekonomi dan cultural memadai, maka dapat berkembang dengan baik. Sebaliknya madrasah yang tidak didukung oleh masyarakat yang mempunyai modal sosial yang kuat akan mengalami masalah. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk mencari alternatif, bagaimana agar mayoritas madrasah yang lahir dari masyarakat yang secara sosial-ekonomi kurang memadai dapat tumbuh berkembang dengan baik, sehingga mutu pendidikannya dapat memenuhi keinginan masyarakat pengguna jasa layanan pendidikan. Maka dari itu, pemberdayaan madrasah sangat diperlukan, terutama dalam mengelola sumberdaya manusia yang tersedia dan sumber daya yang ada di sekitarnya.

Kata kunci: madrasah, pemberdayaan dan pendidikan berbasis masyarakat

Abstract, Madrasah as educational institutions distinctively Islamic religion has its own unique characteristics. The majority of madrasahs born of community initiatives in which the school was born. Since the birth of the community, the quality of madrasah to be diverse. Madrasah is supported by the people who are socio-economic and cultural sufficient, it can develop properly. Instead madrasahs that are not supported by the people who have strong social capital will have problems. Therefore, it becomes important to look for an alternative, how to keep the majority of madrasahs that were born from the people who are socio-economic inadequate able to grow well, so that the quality of education to meet the desires of the user community education services. Therefore, empowering the madrasah is necessary, especially in managing the human resources available and the resources around them.

Keywords; madrasahs, empowerment and community-based education

Latar Belakang

Era otonomi pendidikan memberikan peluang besar bagi perbaikan tata kelola madrasah melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Namun demikian nampaknya madrasah belum sepenuhnya mampu memaksimalkan peluang tersebut. Problem kurangnya kemitraan dialami oleh masyarakat pengelola madrasah. Madrasah kurang mampu mendinamisasi partisipasi masyarakat setempat agar ada rasa kepedulian dalam mengembangkan dan memajukan madrasah. Padahal dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan kualitas, akuntabilitas, relevansi program-program pendidikan yang didesain dan diselenggarakan oleh madrasah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurut H.A.R Tilaar (2004: 22) dalam era desentralisasi sudah saatnya satuan pendidikan didekatkan dengan masyarakat sekitarnya, masyarakat pengguna jasa layanan pendidikannya. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam praksis pendidikan dikenal dengan *community based education* (CBE). Partisipasi masyarakat, tokoh masyarakat dan dunia industri untuk memberi *feedback*, membina dan mengawasi lembaga pendidikan yang ada di sekitarnya. Keterlibatan masyarakat dalam mengontrol praksis pendidikan sangat penting untuk melihat, apakah praktek pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan-satuan pendidikan selama ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat atau belum? Apakah kontribusi masyarakat bagi perbaikan suatu lembaga pendidikan? Sudahkah lembaga-lembaga pendidikan menjadikan masyarakat sebagai sumber belajar, sehingga ketika anak didik telah selesai menempuh program yang diselenggarakan satuan pendidikan dapat mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat? Berbagai pertanyaan ini menarik untuk diteliti, paling tidak untuk mengurai problem pendidikan dalam skala mikro pada satuan pendidikan.

Sudah saatnya pendidikan dikembalikan ke masyarakat, pendidikan harus dilihat sebagai wahana untuk memberdayakan masyarakat bukan sekedar alat pemuas bagi para birokrat yang haus penghargaan karena jabatan yang disandangnya. Ditemukannya kasus pelaksanaan ujian nasional sebagaimana dijelaskan oleh koran Jawa Pos 10 Mei 2014, yang dilakukan oknum guru di Bojonegoro Jawa Timur, merupakan problem serius bagi perbaikan budaya mutu pendidikan di Indonesia. Sementara itu perubahan kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013 bertujuan untuk memperbaiki kualitas *out-put* pendidikan yang lebih komprehensif setelah masyarakat dihadapkan pada kenyataan semakin menurunnya kualitas moral masyarakat. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk mendekatkan program-program pendidikan di madrasah dengan masyarakat sekitarnya.

Menurut H.A.R Tilaar (2004: 164) madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas agama Islam sangat menarik perhatian dalam rangka melaksanakan cita-cita pendidikan nasional, oleh karena bukan semata-mata jumlah muridnya yang signifikan, tetapi karena madrasah mempunyai nilai-nilai positif dan *local wisdom* yang unik. Hal ini ditegaskan oleh Abdurrahman Mas'ud (2002: 26) bahwa madrasah sangat dekat dengan budaya pesantren, mengutamakan *modelling* atau *uswatun hasanah* contoh yang baik yang selayaknya diikuti oleh komunitasnya, menekankan pentingnya budaya *cultural resistance* sehingga melahirkan sikap mandiri tanpa tergantung dengan institusi lain dan mempunyai budaya keilmuan yang tinggi dibuktikan dengan jumlah mata pelajaran yang harus dikuasai murid dalam jumlah banyak. Keunikan tersebut tumbuh dan berkembang sejalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di mana madrasah tersebut

berada. Karena pada umumnya madrasah lahir dan berkembang karena kebutuhan masyarakat pembentuknya.

Secara filosofis lahirnya konsep *community based education* (CBE), menuntut struktur manajemen pendidikan yang harus disesuaikan dengan keikutsertaan masyarakat secara aktif. Ditegaskan oleh Azyumardi Azra (2000: 153) bahwa keikutsertaan masyarakat dalam struktur manajemen pendidikan, dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi terciptanya lembaga pendidikan yang akuntabel, efektif dan berkualitas. Pendidikan yang berakar pada masyarakat berarti pula adanya partisipasi dan kontrol masyarakat sebagai pemilik dan pengguna jasa layanan pendidikan. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga sosial (*social institutions*) yang telah ada di madrasah diperkuat, sementara yang belum ada dan diperlukan oleh madrasah perlu dibentuk, seperti paguyuban wali murid antar kelas.

Lembaga-lembaga sosial (*social institutions*) dimaksudkan untuk mewedahi aspirasi masyarakat dan memberi *feedback* bagi pelaksanaan program pendidikan di madrasah. Sementara madrasah sebagai penyelenggara pendidikan perlu didukung oleh tenaga-tenaga pendidik yang ahli dalam bidangnya dan diberi kesempatan untuk melakukan berbagai inovasi pembelajaran. Oleh sebab itu *community based education* (CBE) perlu dikembangkan berdasarkan situasi sosial dan potensi di mana lembaga pendidikan tersebut berada. Potensi masyarakat di sekitar sekolah perlu dielaborasi, potensi orang tua murid perlu digali, berbagai kerjasama antara sekolah dengan fihak masyarakat perlu dirancang.

B. Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat

Menurut H.A.R Tilaar (2004: 22) istilah *community based education* (CBE) digunakan untuk menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam praksis pendidikan. *Community Based Education* menuntut masyarakat (orang tua, pemimpin masyarakat lokal, pemimpin nasional, dunia kerja, dunia industri) harus ikut serta dalam membina dan mengawasi lembaga pendidikan yang ada di sekitarnya. Secara filosofis lahirnya konsep *community based education* (CBE), menuntut struktur manajemen pendidikan yang harus disesuaikan dengan keikutsertaan masyarakat secara aktif. Keikutsertaan masyarakat dalam struktur manajemen pendidikan, dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi terciptanya lembaga pendidikan yang akuntabel, efektif dan berkualitas.

Sementara itu menurut Azyumardi Azra (2000:153), istilah *community based education* (CBE) digunakan untuk menjelaskan peranserta masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan satuan pendidikan, yang dapat dikerangkakan sebagai berikut; *pertama*, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan, yakni pengembangan manajemen yang

lebih *accountable*, baik dari segi keuangan maupun pengelolaan organisasi madrasah itu sendiri. Melalui peningkatan ini, sumber-sumber finansial masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara lebih efisien untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas madrasah; *kedua* peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan madrasah yang *quality oriented*, yakni pendidikan yang berkualitas dan berkeunggulan, yang pada gilirannya akan mendorong perkembangan madrasah sehingga dapat melahirkan *out-put* yang mempunyai paradigma keilmuan yang komprehensif yakni perpaduan antara ilmu umum dan ilmu agama; dan *ketiga*, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber belajar yang ada di masyarakat, sehingga madrasah tidak terpisah dan tetap menjadi bagian integral dari masyarakat muslim secara keseluruhan. Melalui pengembangan ini, satuan pendidikan/ madrasah dapat menjadi “*core*” dari *learning society*, masyarakat belajar yang pada gilirannya membuat anak didik keluaran lembaga pendidikan Islam lebih berkualitas dan dapat menyatu dengan masyarakatnya.

C. Dinamika Madrasah sebagai Pendidikan Berbasis Masyarakat

Menurut Muhaimin (2005: 186) dilihat dari sisi historitasnya terdapat dua faktor yang mempengaruhi lahirnya madrasah di Indonesia, yaitu, *pertama*, adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan Islam tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat; *kedua*, adanya kekuatiran atas cepatnya perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekuler di masyarakat. Untuk menyeimbangkan perkembangan sekulerisme maka masyarakat muslim melakukan reformasi melalui upaya pengembangan pendidikan dan pemberdayaan madrasah.

Pendapat tersebut di atas dikuatkan oleh Azyumardi Azra (2000: 99) bahwa madrasah di Indonesia lahir sebagai bentuk modernisasi sistem pendidikan Islam yang tradisional. Faktor pendorong lahirnya gerakan ini adalah adanya ekspansi pemerintahan kolonial Belanda dan Kristen. Dalam konteks ini ditemukan adanya Sekolah Diniyyah Zainuddin Labay al-Yunusi, Sumatra Thawalib, madrasah yang didirikan al-Jami’atul Khairiyyah dan kemudian juga madrasah-madrasah yang didirikan oleh al-Irsyad.

Sejalan dengan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat muslim Indonesia, modernisasi sistem pendidikan Islam pasca kemerdekaan menemukan momentumnya. Pesantren sebagai induk semang madrasah, yang pada awalnya hanya mengajarkan kajian-kajian ke-Islaman pada akhirnya memberikan respons terhadap ekspansi sistem pendidikan umum yang disebarkan pemerintah dengan memperluas cakupan kajian di dalamnya. Setidaknya terdapat dua cara yang digunakan pesantren sebagai induk madrasah dalam merespon dinamika yang berkembang di masyarakat; *pertama*, merevisi kurikulum pesantren dengan memasukkan semakin banyak mata

pelajaran umum atau bahkan ketrampilan umum; dan *kedua*, membuka akses kelembagaan dan fasilitas-fasilitas kelebagaannya bagi kepentingan pendidikan umum (Azyumardi Azra, 2000: 102).

Pada dekade 1950-an dan awal 1960-an dalam masa-masa kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia, sejumlah pesantren melakukan pembaharuan dengan memberikan ketrampilan, khususnya dalam bidang pertanian. Penekanan pada bidang ketrampilan ini dengan mudah dapat dipahami; dalam masa-masa sulit seperti itu, pesantren semakin dituntut untuk *self-supporting* dan *self-financing*. Karena itu banyak pesantren di pedesaan, seperti Tebuireng dan Rejoso di Jombang mengarahkan para santrinya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan *vocational* dalam bidang pertanian, seperti menanam padi, kelapa, tembakau, kopi dan lain-lain. Hasil penjualan dari usaha pertanian tersebut digunakan untuk membiayai pesantren. Kemudian pada fase berikutnya dijumpai beberapa pesantren mengembangkan usahanya ke arah pendirian koperasi seperti: Gontor, Denanyar, Tambakberas, Tebuireng Tegalrejo dan lain sebagainya. Melalui koperasi ini, minat kewirausahaan para santri dibangkitkan, untuk kemudian diarahkan menuju pengembangan pengelolaan usaha ekonomi apabila para santri kembali ke masyarakatnya (Azyumardi Azra, 2000: 103).

Melihat fakta sejarah tersebut di atas, kebijakan tentang desentralisasi pendidikan sebenarnya bukan hal yang asing bagi madrasah. Terlebih banyak madrasah yang lahir dan tumbuh dari inisiatif masyarakat sendiri (H.A.R. Tilaar, 2004: 152). Masyarakat dalam hal ini, baik individu maupun organisasi membangun madrasah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Tidak mengherankan apabila madrasah yang dibangun oleh masyarakat bisa seadanya saja atau memakai tempat apa adanya. Mereka didorong oleh semangat keagamaan dan dakwah untuk mencari ilmu dan mengamalkan ajaran agama Islam. Hingga saat ini tidak mengherankan apabila jumlah madrasah yang ada di Indonesia kurang lebih 90% milik swasta sedangkan sisanya berstatus negeri (Muhaimin, 2005: 185).

Apabila dewasa ini diskursus pendidikan nasional mewacanakan pentingnya inovasi pendidikan nasional untuk melahirkan pendidikan yang dikelola masyarakat *community-based management* (CBM) maka pesantren sebagai induk semangnya madrasah merupakan model yang *archaic*. Namun tentu prinsip-prinsip manajemen modern perlu diterapkan di dalam pola pendidikan yang berdasarkan manajemen masyarakat. Pada akhirnya *community-based management* dari pendidikan akan bermuara kepada manajemen sekolah (*school-based management*) atau manajemen madrasah yang berarti pengelolaan lembaga pendidikan madrasah adalah pengelolaan yang otonom yang mengimplementasikan aktivitas dan kreativitas para pengelolanya baik kepala sekolah maupun para gurunya di dalam melaksanakan misi sekolah.

Tentu CBM dan SBM menuntut para pengelola yang mempunyai pandangan yang luas serta menguasai teknik-teknik manajemen modern, termasuk manajemen sekolah.

D. Arti Pemberdayaan bagi Madrasah

Pranarka (1996: 261) menjelaskan, secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau pemberdayaan). Sebagai sebuah konsep, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Konsep dan gerakan pemberdayaan memusatkan perhatian pada kenyataan bahwa manusia atau sekelompok orang dapat mengalami kendala dan hambatan dalam proses dan gerak aktualisasi eksistensinya. Oleh sebab itu, perhatian gerakan pemberdayaan adalah berusaha menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi setiap orang dapat melaksanakan tugas aktualisasi eksistensinya seluas-luasnya dan setinggi-tingginya. Selain berhubungan dengan gerakan membangkitkan kesadaran akan eksistensi seseorang atau sekelompok orang, pemberdayaan juga memusatkan perhatian pada penyebab lahirnya kendala bagi seseorang atau sekelompok untuk mewujudkan aktualisasi eksistensinya.

Ditegaskan oleh Edi Suharto (2009: 59) sebagai sebuah proses, pemberdayaan merupakan sebuah konsep pemberian wewenang kepada individu atau kelompok masyarakat untuk mengambil keputusan secara otonom, partisipatif dan demokratis. Pemberian wewenang tersebut sebagai strategi pembelajaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai humanitas, bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki kemampuan dan potensi yang dapat disumbangkan bagi kehidupan bersama, baik dalam konteks kehidupan berbangsa maupun dalam kehidupan bernegara. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan mempunyai 3 tahapan: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Penyadaran merupakan tahap pertama dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, madrasah swasta diberikan penyadaran bahwa lembaga tersebut mempunyai potensi dan kelebihan yang dapat dikembangkan menuju lembaga pendidikan yang lebih berkualitas. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap penyadaran tersebut, misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat *kognisi*, *belief* dan *healing*. Prinsip dasar pada tahap ini adalah membuat target mengerti bahwa lembaga atau organisasi perlu diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang luar).

Tahap kedua pemberdayaan adalah pengkapasitasan atau *capacity building* yang artinya adalah “memampukan”. Untuk diberikan pemberdayaan, sebuah organisasi atau lembaga harus terlebih dahulu diberi bekal pengetahuan. Misalnya sebelum sebuah madrasah diberikan tanggungjawab menjadi “madrasah unggulan” terlebih dahulu diberikan program-program pengkapasitasan untuk membuat lembaga tersebut cakap “*skillfull*” dalam mengelola madrasah unggulan. Proses *capacity building* meliputi tiga jenis, yaitu pengkapasitasan manusia, organisasi dan sistem nilai.

Pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain dengan menyelenggarakan pelatihan (*training*), workshop, seminar, semiloka dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah pengkapasitasan organisasi. Pengkapasitasan organisasi dapat dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi. Tujuan restrukturisasi organisasi antara lain adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja organisasi. Namun demikian, langkah ini kadang menimbulkan masalah baru dalam suatu organisasi, yakni rasa ketidakpuasan sebagian orang karena wewenang dan pekerjaannya dikurangi atau dipangkas. Oleh sebab itu, dalam pengkapasitasan organisasi tersebut akan lebih baik jika organisasi ditata ulang strukturnya berdasarkan kondisi dan kebutuhan lembaga, dijelaskan tugas dan wewenangnya sehingga masing-masing orang yang terlibat di dalamnya akan berbuat secara prosedural sesuai dengan aturan organisasi atau lembaga. Pengkapasitasan berikutnya adalah sistem nilai. Setelah orang dan lembaga diberikan pengkapasitasan, maka sistem nilai juga perlu diberikan pengkapasitasan. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membantu target dan membuatkan “aturan main” di antara para pengurus organisasi. Dalam cakupan organisasi, sistem nilai berkenaan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Prosedur Korporasi dan lain sebagainya. Pada tingkat yang lebih lanjut, sistem nilai terdiri atas budaya organisasi, etika dan *good governance*.

Tahap ketiga pemberdayaan adalah pemberian daya itu sendiri atau *empowerment* dalam makna sempit yakni memberikan kekuasaan. Pada tahap ini, lembaga atau organisasi diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian daya ini disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki organisasi. Tujuannya adalah agar organisasi tersebut dapat mengelola program-program kegiatan yang telah mereka rencanakan dapat dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Karena masing-masing lembaga mempunyai situasi dan kondisi yang berbeda-beda (Randy R. Wrihatnolo & Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007).

Pemberdayaan pada umumnya mempunyai keterkaitan dengan pengembangan sumberdaya yang dimiliki oleh sebuah organisasi, baik sumberdaya yang berasal dari dalam maupun sumberdaya yang tersedia di luar. Pemberdayaan diperlukan sebagai prasyarat untuk

menumbuhkan kesadaran di kalangan anggota organisasi. Dalam konteks pendidikan, pemberdayaan sangat diperlukan oleh sekolah sebagai kiat untuk menumbuhkan kesadaran kritis bahwa perubahan menjadi tanggungjawab bersama, setiap elemen yang ada dalam sekolah.

Untuk memahami makna pemberdayaan, terdapat 2 kata kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan dalam konteks ini, dipahami bukan sebatas pada aspek politik yang sempit, tetapi kekuasaan yang berhubungan dengan berbagai aspek kemampuan, antara lain:

- a) kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup dan model kehidupan yang hendak dikembangkan;
- b) kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya;
- c) kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam kehidupan yang lebih luas tanpa tekanan;
- d) kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat;
- e) kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan;
- f) kemampuan mengelola mekanisme produksi, distribusi, pertukaran barang dan jasa, serta
- g) kemampuan dalam kaitannya dengan proses memproduksi jasa dan manfaatnya bagi lingkungan.

Dalam konteks pendidikan berbasis masyarakat, makna pemberdayaan bagi madrasah dapat diartikan dalam beberapa hal, antara lain;

1. Kemampuan membuat keputusan tentang model pendidikan yang dipilih madrasah sebagai kebutuhan masyarakat yang memerlukannya.

Menurut KH. MA. Sahal Mahfudh (1994: 278-279) terdapat tiga masalah mendasar yang dihadapi madrasah saat ini, antara lain;

- a) Masalah identitas madrasah.

Masalah ini bersumber dari respon madrasah terhadap realitas yang berkembang di masyarakat. Realitas masyarakat Indonesia saat ini, sedang dalam masa transisi sebagai dampak terjadinya proses reformasi. Persoalan demokrasi, hak asasi manusia, pluralitas, kebebasan pers dan globalisasi menjadi isu utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Sementara itu, realitas yang berkembang di madrasah pada umumnya lamban dalam merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat;

- b) Masalah sumberdaya manusia internal madrasah dan pemanfaatannya bagi pengembangan madrasah ke depan.

Mayoritas sumberdaya manusia yang dimiliki madrasah homogen, lulusan perguruan tinggi Islam, kecenderungannya memiliki disiplin keilmuan yang sama. Sehingga pengembangan

madrasah menjadi kurang dinamis dan inovatif. Dilihat dari struktur keilmuan yang dikembangkan di madrasah, sudah saatnya keahlian, kualifikasi dan kompetensi menjadi pertimbangan utama dalam melakukan rekrutmen tenaga pendidik di madrasah. Tentu selain beberapa pertimbangan tersebut, para guru juga harus dikenalkan dengan tradisi madrasah sebagai institusi Islam yang dekat dengan tradisi pesantren. Sehingga nilai-nilai pesantren tidak diabaikan; dan

c) Masalah pengelolaan madrasah.

Menurut H.A.R. Tilaar (2004: 153), bahwa persoalan madrasah terletak dari keunikannya bahwa madrasah tumbuh dari bawah, dari masyarakat sendiri. Dalam pertumbuhannya tersebut, madrasah lahir dari komunitas masyarakat yang secara ekonomi berasal dari keluarga tidak mampu, tentu kondisi tersebut menimbulkan situasi serba sulit bagi madrasah. Pengelolaan madrasah yang berorientasi kepada masyarakat telah melahirkan keanekaragaman pengelolaan sehingga sulit untuk dicarikan standar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam menghadapi tuntutan modernisasi dan globalisasi karena standar-standar tertentu diperlukan maka pengelolaan pendidikan di madrasah perlu disesuaikan agar lebih peka dalam menyikapi kehidupan global yang penuh persaingan.

2. Makna pemberdayaan madrasah dapat diartikan sebagai kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

Untuk menentukan kebutuhan yang selaras dengan keinginannya, maka madrasah perlu dibekali dengan kemampuan mengidentifikasi masalah yang terjadi di dalamnya secara mandiri. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI (2011:23) kemampuan mengenali masalah madrasah secara mandiri disebut dengan Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Evaluasi Diri Madrasah adalah proses evaluasi yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk melihat kinerja madrasah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan Madrasah.

Proses Evaluasi Diri Madrasah diawali dengan pembentukan tim pengembang madrasah dan pelatihan penggunaan instrumen yang digunakan evaluasi diri madrasah. Tim pengembang terdiri dari; kepala madrasah, wakil unsur guru, wakil komite madrasah, wakil orang tua siswa dan pengawas madrasah. Tim Pengembang madrasah mengumpulkan berbagai bukti dan informasi dari berbagai sumber untuk menilai kinerja madrasah berdasarkan indikator-indikator yang telah dirumuskan dalam Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pendidikan Nasional. Berdasarkan berbagai informasi yang diperoleh dari berbagai pihak terkait,

diharapkan akan diperoleh bahan dan informasi yang lebih komprehensif. Berbagai informasi tersebut berhubungan dengan perbaikan layanan pembelajaran bagi peserta didik dan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan para guru dalam kegiatan proses belajar mengajar di madrasah. Kegiatan evaluasi diri madrasah dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dijadikan sebagai pijakan untuk menyusun Rencana Kegiatan Madrasah.

3. Kemampuan memanfaatkan pranata-pranata sosial yang ada di sekitar madrasah.

Sebagian besar madrasah didirikan dan dikelola oleh swasta. Dengan label pendidikan yang dikelola oleh swasta memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan saran bagi perbaikan kualitas proses pengelolaan madrasah, peningkatan kualitas guru, peningkatan hasil belajar siswa dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Berbagai upaya tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan pranata-pranata sosial yang berada di sekitar madrasah. Sebagai ilustrasi, berdasarkan hasil evaluasi diri madrasah, ditemukan sejumlah guru di madrasah belum mampu menerapkan strategi pembelajaran aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Maka kepala madrasah bersama dengan komite madrasah merancang kegiatan peningkatan mutu guru dalam bidang penerapan strategi pembelajaran aktif dengan melibatkan nara sumber yang berasal dari institusi atau jaringan (*networking*) yang dimiliki madrasah. Dalam hal memberikan pengalaman belajar yang kongkrit kepada peserta didik, kepala madrasah dan guru dapat memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Kerjasama antara masyarakat sekitar dengan pihak madrasah dituangkan dalam bentuk surat tertulis, sehingga dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akreditasi dan meningkatkan akuntabilitas program pembelajaran.

E. Model Pemberdayaan Madrasah

Prakarya masyarakat muslim Indonesia dalam memberdayakan madrasah sangat signifikan dan dominan. Sepanjang sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, masyarakat muslim mengambil peran penting dalam pendirian, pengembangan dan pemberdayaan madrasah.

Menurut Azyumardi Azra (2000: 149), dalam beberapa dasawarsa terakhir, terdapat dua kecenderungan model pemberdayaan madrasah yaitu:

1. berkembangnya hasrat dalam kalangan muslim untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada pemerintah untuk memberdayakan madrasah dalam berbagai aspek dengan cara “menegerikan” madrasah-madrasah swasta. Dengan semakin kuatnya kondisi negara baik dari sisi birokrasi maupun keuangan, khususnya sejak era 1970-an, negara membuka banyak akses kepada lembaga pendidikan Islam yang pada awalnya cenderung tertutup

bahkan menjaga jarak dengan pemerintah. Perkembangan ini mendapatkan momentumnya sejak akhir tahun 1980, ketika negara melakukan perbaikan hubungan dengan Islam, ditandai dengan dimasukkannya sistem pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional dan adanya Surat Keputusan Bersama 3 menteri: Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri. Sejak saat itu respon kaum muslim terhadap negara cenderung hangat, dalam konteks ini pendidikan Islam semakin menggantungkan banyak harapan kepada negara untuk memberdayakan madrasah.

2. adanya kecenderungan masyarakat muslim untuk melakukan konsolidasi sumberdaya dan sumberdana untuk membangun lembaga pendidikan Islam yang berkualitas. Kecenderungan ini dapat diamati dengan berdirinya madrasah-madrasah swasta “unggulan” sebagai respon berkembangnya komunitas muslim “kelas menengah” yang memerlukan pendidikan Islam yang berkualitas. Kondisi masyarakat muslim “kelas menengah” semakin berkembang, sehingga tuntutan menyediakan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, mendorong Departemen Agama untuk mengembangkan “madrasah-madrasah model”.

Dalam memberdayakan lembaga pendidikan Islam, termasuk di dalamnya madrasah, terdapat beberapa pandangan, antara lain:

1. Pandangan Azyumardi Azra.

Menurut Azyumardi Azra (2000: 153), terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pemberdayaan madrasah, antara lain:

- a) peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan;
- b) peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan madrasah yang *quality oriented*; dan
- c) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber belajar yang ada di masyarakat, sehingga madrasah tidak terpisah dan tetap menjadi bagian integral dari masyarakat muslim secara keseluruhan.

2. Pandangan Mastuhu

Menurut Mastuhu (1999: 35), pemberdayaan madrasah dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan paradigma. Paradigma yang dimaksud disini adalah pemikiran yang terus-menerus dikembangkan melalui pendidikan untuk merebut kembali ilmu

pengetahuan sebagaimana yang terjadi pada masa keemasan Islam. Paradigma baru disini dikembangkan berdasarkan filsafat *teocentris* dan *antroposentris*. Prinsip yang dikembangkan dalam paradigma ini adalah tidak adanya dikotomi antara ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum.

3. Pandangan Muhaimin.

Menurut Muhaimin (2005:183), pemberdayaan madrasah dapat dilakukan dengan mengembangkan model kurikulum. Pengembangan pendidikan di madrasah tidak dapat ditangani secara parsial tetapi memerlukan pengembangan pemikiran yang utuh terutama ketika dihadapkan pada kebijakan pembangunan nasional bidang pendidikan yang mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia yang berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

4. Pandangan H.A Mukti Ali (mantan Menteri Agama RI)

Menurut H.A Mukti Ali dalam Muhaimin (2005: 197) pemberdayaan madrasah dapat dilakukan dengan konsep alternatif pengembangan madrasah melalui kebijakan SKB 3 Menteri yang berusaha menyejajarkan kualitas madrasah dengan non madrasah dengan porsi kurikulum 70% umum dan 30% agama. Dilihat dari isu sentralnya Mukti Ali ingin mendobrak pemahaman masyarakat yang bernada sumbang terhadap eksistensi madrasah, dimana ia selalu didudukkan ada posisi marginal, karena ia hanya berkuat pada kajian masalah keagamaan Islam dan miskin pengetahuan umum sehingga lulusannya kurang diperhitungkan oleh masyarakat.

5. Pandangan Munawir Sadzali (mantan Menteri Agama RI)

Menurut Munawir Sadzali dalam Muhaimin (2005: 197) menawarkan konsep Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) sebagai konsep untuk memberdayakan madrasah. Konsep Munawir Sadzali dimaksudkan untuk menjawab problem kelangkaan ulama atau kelangkaan umat yang menguasai kitab-kitab berbahasa arab serta ilmu-ilmu keislaman. Lulusan MAPK diharapkan mampu menjawab masalah tersebut, sekarang ditetapkan sebagai Madrasah Aliyah Kejuruan bidang keagamaan. Sedangkan madrasah aliyah non-keagamaan tidak jauh berbeda dengan SMA.

6. Pandangan Tarmizi Taher (mantan Menteri Agama RI)
Menurut Tarmizi Taher dalam Muhaimin (2005:197) menawarkan konsep madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam, yang muatan kurikulumnya sama dengan sekolah non madrasah.
7. Pandangan A. Malik Fadjar (mantan Menteri Agama RI)
A. Malik Fajdar dalam (Muhaimin, 2005: 199) menindaklanjuti konsep yang digagas pendahulunya dengan memantapkan eksistensi madrasah dengan memenuhi tiga tuntutan minimal dalam peningkatan kualitas madrasah, yaitu:
 - a) bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman;
 - b) bagaimana memperkokoh keberadaan madrasah sehingga mampu merespons tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan era globalisasi.

Dari berbagai bentuk model pemberdayaan madrasah sebagaimana digagas oleh para pejabat dan para pakar tersebut, tentu masing-masing madrasah mempunyai alternatif pilihan untuk mengembangkan model madrasah sesuai yang dengan potensi dan sumber daya manusia yang ada di masing-masing institusi. Pembentukan tim pengembang madrasah, hasil evaluasi diri madrasah, analisa kebutuhan dan analisa harapan tentu perlu dijadikan sebagai pijakan untuk menentukan model pemberdayaan madrasah.

Selain analisa dengan evaluasi diri madrasah, tentu pemanfaatan modal sosial yang dimiliki madrasah perlu dioptimalkan dalam kegiatan pemberdayaan madrasah. Modal sosial yang cakupannya terdiri dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas madrasah, struktur organisasi madrasah yang terbuka dan jaringan yang dimiliki madrasah merupakan elemen penting yang dibutuhkan dalam kegiatan pemberdayaan madrasah.

F. Strategi Pemberdayaan Madrasah

Konsep pemberdayaan dalam kajian ini dimaknai sebagai kegiatan menumbuhkan kesadaran madrasah, untuk melihat problem internal yang dihadapinya baik yang bersifat institusional, kultural maupun personal sumberdaya manusia yang dimiliki madrasah. Selain kemampuan mengenal problem internal yang dihadapi madrasah, kegiatan pemberdayaan juga berkaitan dengan kemampuan memanfaatkan modal yang dimiliki madrasah, baik modal sosial maupun modal kultural. Kemampuan melihat problem dan memanfaatkan modal sosial tersebut sebagai pijakan untuk mendorong madrasah melakukan perubahan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan yang dikembangkannya. Terlebih ketika masyarakat pengguna

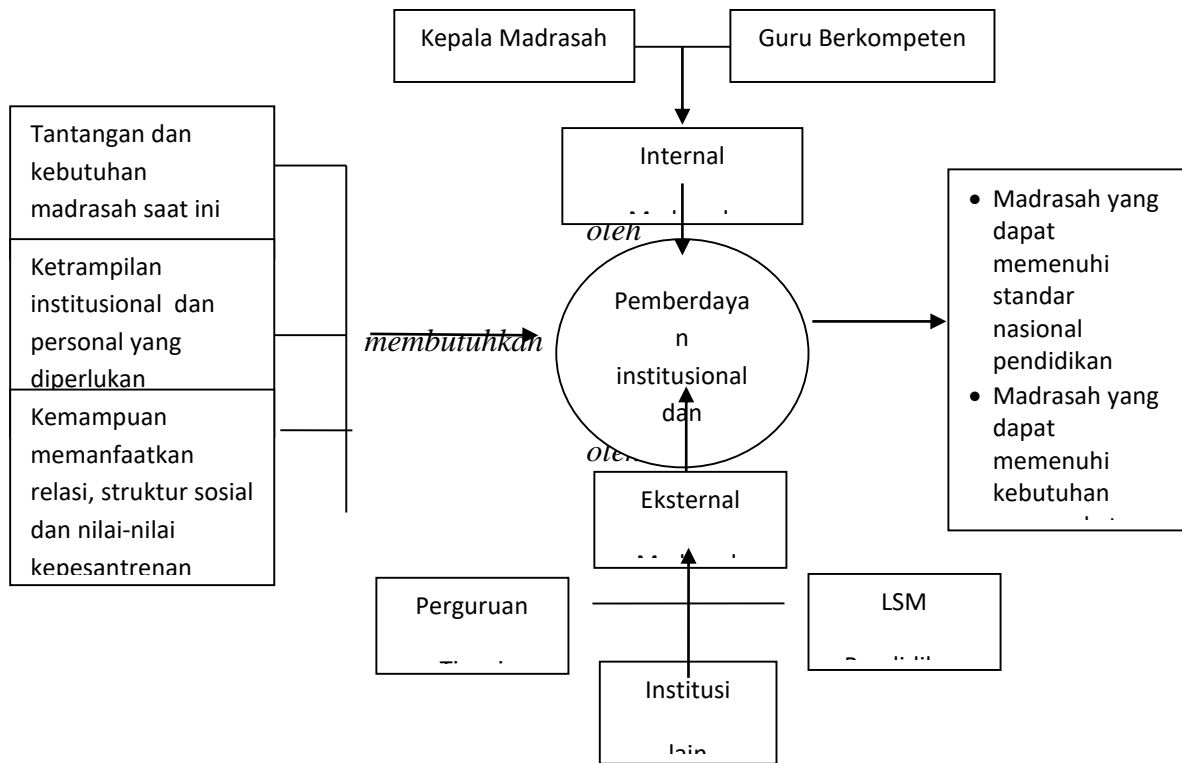
jasa pendidikan di madrasah ibtidaiyah menaruh harapan besar pada institusi ini untuk menghantarkan anak-anaknya menjadi generasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan kehidupan keluarganya. Selain karena adanya tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan di madrasah ibtidaiyah, Pemerintah sebagai pemegang kebijakan pendidikan menerapkan berbagai peraturan terkait dengan mutu pendidikan melalui Standar Nasional Pendidikan.

Sementara itu, menurut H.A.R. Tilaar (2004: 155) terdapat empat bidang yang perlu mendapatkan prioritas bagi pemberdayaan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan Islam;

- (1) peningkatan kualitas;
- (2) pengembangan inovasi dan kreativitas;
- (3) membangun jaringan kerja sama (*networking*); dan
- (4) penguatan semangat otonomi.

Berbeda dengan H.A.R. Tilaar, Agus Nuryatno (2008: 80) menekankan pentingnya membangun *mind set* baru dalam praksis pendidikan tak terkecuali madrasah. Karena selama ini praksis pendidikan di Indonesia sudah terjebak dalam dunia pragmatisme sehingga muncul pertanyaan, target apa yang hendak dicapai pendidikan kita? Apakah *academic values* atau *corporate values*? Menurut Neil Postman dalam Agus Nuryatno (2008: 81) pendidikan diyakini memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk kehidupan politik dan kultural. Oleh karena itu pendidikan diyakini sebagai media untuk menyiapkan dan melegitimasi bentuk-bentuk tertentu kehidupan sosial. Jika demikian, maka institusi pendidikan diharapkan lebih mengedepankan dan menjadi basis pembudayaan nilai-nilai idealisme bukan pragmatisme. Dalam konteks yang sedemikian, cara berfikir kritis menjadi sangat diperlukan oleh para *stakeholder* madrasah, terutama dalam memberdayakan madrasah.

Tuntutan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam hal peningkatan mutu pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa diabaikan oleh madrasah. Relasi antara kemampuan mengidentifikasi masalah yang dihadapi madrasah, cara pemecahan dan pemanfaatan modal sosial tersebut dapat digambarkan dalam peta konsep sebagai berikut:



Alur Pemberdayaan Madrasah

diadaptasi dari konsep John P. Kotter (1996) dan James. S. Coleman (1994).

Sementara itu menurut John P. Kotter (1996: 101-116) terdapat delapan langkah yang diperlukan dalam pemberdayaan untuk aksi yang lebih luas. Delapan langkah tersebut yaitu:

Langkah pertama, menciptakan perasaan terdesak (*sense of urgency*) di antara orang-orang yang mempunyai relevansi dengan usaha perubahan. Karena terlalu banyak rasa puas, rasa takut atau kemarahan telah membuyarkan usaha perubahan. Sebuah perasaan terdesak bila disiapkan dengan menggunakan cara yang amat kreatif membuat orang-orang dapat bergerak keluar dari cangkang dan siap beraksi untuk melakukan perubahan;

Langkah kedua, membentuk tim pemandu (*guiding team*). Tim yang memiliki kredibilitas, keahlian, koneksi reputasi dan wewenang formal sangat diperlukan dalam sebuah kepemimpinan perubahan. Tim ini harus belajar beroperasi sebagaimana tim-tim bagus lainnya, dengan saling memercayai dan memiliki komitmen emosional;

Langkah ketiga, tim pemandu menciptakan kebijakan yang masuk akal, jelas, sederhana mengangkat visi-visi dan serangkaian strategi. Dalam banyak kasus yang sering dihadapi organisasi yang tidak berhasil, strategi-strategi yang digunakan seringkali bersifat terlalu lamban dan hati-hati sehingga tidak sesuai dengan pergerakan cepat dunia;

Langkah keempat, mengkomunikasikan visi dan strategi. Pesan yang amat sederhana dan menyentuh yang disalurkan melalui komunikasi yang baik dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi organisasi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menimbulkan pemahaman, mendorong komitmen berani dan memompa energi yang lebih banyak dari sekelompok orang. Dalam konteks ini tindakan lebih penting daripada kata-kata;

Langkah kelima, usaha pemberdayaan (*empowerment*). Halangan utama yang menghalangi orang-orang untuk bertindak berdasarkan visi bisa disingkirkan. Para pemimpin perubahan berfokus kepada para bos yang tidak memberdayakan, informasi yang tidak memadai dan perasaan kurang percaya diri dari para karyawan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menyingkirkan penghalang bukannya memberikan kekuasaan;

Langkah keenam, membuat kemenangan jangka pendek (*short-term wins*). Kemenangan-kemenangan ini sangatlah penting. Mereka akan memberikan kredibilitas, sumberdaya dan momentum yang berguna untuk usaha perubahan secara menyeluruh;

Langkah ketujuh, tidak pernah mengendur. Para pemimpin perubahan tidak pernah mengendur. Momentum dibangun setelah kemenangan pertama. Perubahan-perubahan awal dikonsolidasikan. Perlu dikaukan identifikasi secara jeli apa yang diperlukan untuk langkah berikut; dan

Langkah kedelapan, membangun kultur baru. Para pemimpin perubahan di seluruh organisasi membuat perubahan bersifat tetap dengan membangun kultur baru. Kultur baru ini merupakan sekelompok norma perilaku dan dinilai-nilai yang diakui bersama-sama dan berkembang melalui konsistensi dari keberhasilan tindakan sepanjang periode waktu yang cukup. Dengan delapan langkah tersebut pemberdayaan diharapkan dapat memberikan perubahan yang berarti dan bermanfaat bagi perbaikan organisasi maupun lembaga.

Penutup

Secara historis, kehadiran madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional turut memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya tujuan pendidikan nasional. Namun demikian, madrasah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang secara nyata perlu pemecahan. Masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki madrasah, minimnya jaringan kemitraan yang dimiliki madrasah dan lemahnya kepemimpinan kepala madrasah merupakan problem internal yang datang dari madrasah sendiri. Sementara itu problem eksternalnya adalah pembinaan yang diberikan kepada madrasah masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum. Oleh sebab itu, madrasah perlu diberdayakan sehingga memiliki kemampuan untuk memperbaiki mutu pendidikannya secara mandiri.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam; tradisi dan modernisasi menuju millennium baru*, (Ciputat: Logos, 2000)
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, *Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/ Madrasah* (Jakarta: BOS, 2011)
- Kotter, John. P & Cohen, S.. *The heart of change*. (Deloitte consulting LLC, 2002)
- Mahfud, Sahal, *Dinamika pesantren dan madrasah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Mastuhu. *Memberdayakan sistem pendidikan Islam*. (Ciputat: Logos, 1999)
- Muhaimin, *Wacana pengembangan pendidikan Islam*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- . *Pengembangan kurikulum agama Islam di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
- Nuryatno, Agus, *Mazhab Pendidikan Kritis* (Yogyakarta: Resist Book, 2008)
- Pranarka & Moeljarto, Vidhyandika. *Pemberdayaan (empowering)*. (Jakarta: CSIS, 1996)
- Rosyada, Dede. *Paradigma pendidikan demokratis: Sebuah model pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan*.(Jakarta: Kencana, 2007)
- Suharto, Edi. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial& pekerjaan sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Tilaar, H.A.R. *Membenahi Pendidikan Nasional* (Bandung: Rineka Cipta, 2009)
- . *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Bandung: Rineka Cipta, 2004)